



## Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang

**Diah Andani**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[diah.andani30101992@gmail.com](mailto:diah.andani30101992@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang sesuai dengan teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi terdiri dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas, layanan, responsivitas dan akuntabilitas Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang sesuai dengan teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) Yaitu Produktivitas, bahwa bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja sudah cukup berhasil. Disisi lain masih perlu upaya - upaya akselerasi yang sesuai dengan permasalahan public yang dihadapi baik yang mencakup unsur social, ekonomi, teknis maupun unsur kelembagaan seperti permasalahan yang mencakup tempat penampungan air irigasi atau tidak berfungsi optimal sebagai sumber air setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi. Responsivitas, bahwa sudah diperhatikan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR Kabupaten Subang. Walaupun masih dihadapkan pada kendala dan tantangan yang kompleks dan dinamis untuk merealisasikan kehendak masyarakat. Akuntabilitas, bahwa kinerja Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator akuntabilitas tetapi upaya meningkatkannya lagi dimasa yang akan datang.

**Kata kunci:** Kinerja, Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya Air. Subang



### **Abstract**

*The purpose of the author conducting this study was to determine the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency. This research and writing discusses matters related to how the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency is in line with the theory of Agus Dwiyanto (2012: 50-51) related to measuring organizational performance consisting of 5 indicators, namely productivity, quality, service, responsiveness and accountability. In this study, it uses a descriptive qualitative approach research, because this study aims to obtain the picture studied used to reveal problems in the working life of government organizations and observations, interviews, literature studies, and documentation. There is no other option than to make the researcher himself the main research instrument. Data sources are obtained from informants through direct observation and interviews and documents are obtained in the form of regulatory regulations and data processing. The results showed that the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency was in line with Agus Dwiyanto's theory (2012: 50-51), namely Productivity, that the plans and realizations that became performance achievements were quite successful. On the other hand, efforts are still needed to accelerate in accordance with the public problems faced both which include social, economic, technical and institutional elements such as problems that include irrigation water reservoirs or do not function optimally as a local water source with a level of coverage of irrigation services. Responsiveness, that has been considered in the performance of the General Work Office and PUPR of Subang Regency. Although still faced with complex and dynamic obstacles and challenges to realize the will of the community. Accountability, that the performance of the Subang Regency PUPR Office is quite concerned about accountability indicators and efforts to improve it again in the future.*

**Keywords:** Organizational, Performance, Water Resources Management

### **Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah selaras dengan Amanah Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (7) bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang yang secara khusus memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk membangun kinerja yang semakin efektif memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih konkret memprioritaskan kepada permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Saat ini kinerja pemerintah daerah dihadapkan dengan kompleksitas dan dinamika permasalahan yang harus diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan publik. Pembangunan yang menyeluruh dalam berbagai bidang pengembangan harus dilaksanakan selaras dengan tuntutan publik. Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini pun diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah telah semakin memeperhatikan dan menekankan khususnya pada kinerja pemerintah daerah yang berdaya dan berhasil guna sampai pada akar rumput masyarakat. Kinerja ini merupakan gambaran tingkat pencapaian



pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Kinerja pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi yang dijanjikan, pada dasarnya dibangun berdasarkan kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai pertanggung jawaban kepada public, kinerja pemerintah daerah juga harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan visi dan misi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat berbagai kebijakan dan program yang dijalankan memiliki arahan dan tujuan yaitu membangun visi dan misi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang. Visi jangka Panjang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan adalah mewujudkan Kabupaten Subang sebagai daerah agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dan religius serta berbudaya melalui pembangunan berbasis gotong - royong pada tahun 2005. Adapun yang terjadi misi pemerintah Kabupaten Subang : 1) mewujudkan SDM yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, 3) mewujudkan prasarana yang berkualitas, 4) mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari, 5) mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Kabupaten Subang, secara sosio-hitoris maupun ekologi adalah suatu bentuk masyarakat yang sangat lekat dengan kehidupan agraris. Berbagai bentuk aktivitas produksi pertanian, mulai dari pertanian sawah (padi), perkebunan, perikanan darat dan laut serta perladangan hutan, telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat suabng secara turun - temurun. Dengan bentang alam yang sangat mendukung pengembangan pertanian, maka sistem sosial budaya masyarakatnya pun tidak lepas dari siklus - siklus dunia pertania - pertanian itu sendiri.

Dengan sosio-ekonomi, kultural dan ekologis yang sangat potensial di atas, maka Pemerintah Kabupaten Subang memiliki tugas strategis yakni berkenan dengan sumber daya air yang menjadi bagian dari tugas pokok yang ada pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Berdasarkan peraturan Bupati Subang Nomor 55 Tahun 2016 bahwa Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang memiliki tugas pomkok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten. Adapun pelaksanaan tugas bidang sumber daya air berdasarkan ketentuan mencakup menyiapkan bahan perumusan, pembinaan, pembangunan, pengendalian, perlindungan, sistem informasi, pemeberdayaan, evaluasi dan pengawasan kebijakan teknis serta penyelenggaraan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasi SDA sesuai dengan batasan kewenangan kabupaten diantara fungsinya dalam penyusunan program kerja dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pengumpulan dan pengolahan data teknis pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyusunan, pengumpulan dan pengolahan perencanaan jaringan irigasi, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan operasional SDA dan rekomondasi izin,



penyelenggaraan dan pengendalian pada kegiatan pelaksanaan kontruksi bidang SDA, penyusunan pengelolaan system manajemen bidang SDA, pelaksanaan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan bidang SDA, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemebangunaqn bidang SDA, penyiapan telaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas, pelaksanaan kordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang surmebr daya air, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Secara umum bidang sumber daya air melingkupi tugas - tugas pada seksi pembangunan irigasi, seksi pembangunan bending dan bengunan pelengkap serta terkait bina manfaat sumber daya air.

Dibeberapa wilayah subang memang terdapat kecenderungan terjadinya penyusutan lahan pertanian untuk kegiatan industri dan perumahan, nemun demikian jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mengubah keadaan daerah yang selama ini berorientasi pada kegiatan ekonomi pertanian. Dengan demilikan dengan dilihat dari jumlah fungsi lahan atau penggunaan tanah, jumlah tanah pertanian masih menempati kedudukan utama atau jauh lebih tinggi disbanding dengan lahan non-pertanian. Ini berarti kegiatan pertanian di Kabupaten Subang merupakan kegiatan utama bagi masyarakat atau dengan kata lain Kabupaten Subang merupakan daerah agraris. Berdasarkan pada data tertulis di BAPPEDA Kabupaten Subang, dari luuas wilayah Kabupaten Subang mencapai 205.176,95 ha itu seluas 84.710,000 lahan digunakan untuk tanah sawah. Tanah sawah itu sendiri dapat berlangsung sebanyak dua kali dalam setahun.

Pengelolaan sumber daya air menjadi strategis dan akan menentukan hajat hidup masyarakat Kabupaten Subang, atau dengan kata lain menyangkut perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Kondisi irigasi misalnya, bila tidak terkelola dengan baik akan berakibat fatal bagi pertanian dan system irigasi lingkungan lainnya. Kabupaten Subang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah akan rusak dan hilang bila tidak didukung oleh sistem irigasi yang baik. Kaerusakan irigasi air akan berdampak bagi lahan pertanian. Jaringan irigasi menjadi sumber pengairan lahan pertanian teknis sejumlah daerah di Kabupaten Subang. Terlebih dimusim kemarau di subang sering dialami aliran air dalam jaringan irigasi klian menyusut sehingga menyebabkan sawah kekurangan air.

Kompleksitas tugas yang penuh tantangan dalam meningkatkan kinerja Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penetapan Ruang Kabupaten Subang. Tata Kelola dengan peningkatan aparatur dengan berbagai stakeholder menjadi tugas penting dan perl memperoleh perhatian untuk menjaga dan memelihara sumber daya air sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup akan menentukan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjamin kelestarian ekosistem yang ramah lingkungan.

Penulis tertarik untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah. Untuk hal ini penulis melihat bahwa kinerja bidang sumber daya air belum optimal perlu dikaji mengingat masih ditemui permasalahan.

Beberapa indikator permasalahan yang penulis temui diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :



1. Beberapa hasil kegiatan dalam pekerjaan lenning belum sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan.
2. Beberapa usulan pembangunan dan pemeliharaan lenning yang diminta masyarakat melalui mustrenbang desa, kecamatan dan kabupaten belum terlealisasikan mengingat usulan masih tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Belum terselesaikan secara optimal pekerjaan lenning di beberapa wilayah di Pantura.

### **Kerangka Teori**

Dalam analisis pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang dengan menggunakan teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi terdiri dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas, layanan, responsivitas dan akuntabilitas. Produktivitas; Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Kualitas Layanan; kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi public. Responsivitas; responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat Menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program – program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsibilitas; Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Akuntabilitas; Akuntabilitas public menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprentasikan kepentingan rakyat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Karena peneliti ingin mendalami bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. Sedangkan data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.

Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang, Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang, dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri



yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan.

Berdasarkan kriteria keabsahan data diataspenulis menggunakan kriteria kepercayaan (*credibility*). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk memeriksa validitas data ini adalah pemeriksaan triangulasi. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dan disajikan serta dianalisismelalui reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau vertifikasi.

### Hasil dan Pembahasan

Target sasaran luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2016 sasuai perjanjian kinerja adalah sebesar 53.750 Ha. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 mencapai 45.653 Ha, sehingga target dalam RPJMD belum tercapai. Capaian kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD (tahun 2018) adalah sebesar 58.722 Ha, sehingga capaian kinerja smapai dengan tahun 2016 baru mencapai 77,74% dari target RPJMD.

Untuk mempercepat tersedianya infrastuktur yang baik dan segera mencapai target RPJMD ini maka Dinas PUPR Kabupaten Subang terus mengusulkan penambahan anggaran selain dari dana APBD Kabupaten Subang melalui dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. Pada tahun 2016 ini diperoleh dana dari APBD Provinsi untuk Bidang Pengairan dan juga telah diperoleh dana yang berasal dari DAK.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi garapan utama Dinas PUPR Kabupaten Subang pada tahun 2016 dilaksanakan melalui 21 program dengan 107 kegiatan, sehingga total kegiatan pada tahun 2016 adalah 114 kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output penting realisasi kinerja actual tahun 2016 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Berdasaarkan keterangan informan, data-data dan hasil observasi maka penulis berpendapat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang dilihat dari indikator produktivitas cukup berhasil. Hal ini berarti bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja cukup berhasil. Disisi lain masih perlu upaya -upaya akselerasi unsur social, ekonomi, tenis maupun unsur kelembagaan seperti permasalahan yang menyangkut tempat penampungan air irigasi atau tidak berfungsi optimal sebagai sumber setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi.

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak -pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan prima, antara lain:

1. Data -data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data -data maupun informasi



yang penting berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang melalui kegiatan - kegiatan konsultasi seperti perencanaan maupun studi kelayakan;

2. Masih kurangnya pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundang - undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung., sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan;

Berkaitan dengan permasalahan internal dan eksternal dalam RENJA tahun 2017 dikemukakan;

1. Permasalahan internal

a. Sumber Daya Manusia

Realita, antara jumlah personel yang ada dengan besarnya tugas dan tanggung jawab sangat tidak seimbang. Belum tepenuhinya kebutuhan akan SDM dengan kompetensi personel sesuai kebutuhan bidang Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan. Permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung Sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah dan perlu ditingkatkannya koordinasi, integrasi maupun sinkronisasi dengan unit/organisasi lain.

b. Prasarana dan Sarana

Sebagai pelaksana di bidang pembangunan fisik, prasarana dan sarana tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang belum dapat memenuhi kebutuhan Dinas. Gedung kantor sebagai pusat pengendali pelaksanaan kegiatan pun belum representative. Karena luasan Gedung kantor tidak mampu menampung jumlah pegawai yang hampir mencapai 289 orang. Kemudian sarana penunjang lainnya seperti kendaraan dinas operasional juga belum memenuhi kebutuhan Dinas.

c. Anggaran

Data tersebut menjelaskan, bahwa 15 -20 % dana dari APBD Kabupaten Subang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Kontribusi pihak ketiga (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Subang juga semakin meningkat, demikian pula partisipasi masyarakat, diharapkan kedepannya dapat lebih mandiri.

2. Pengaruh Eksternal

Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang tidak hanya disebabkan oleh kondisi internal saja tetapi juga oleh situasi eksternal. Kondisi eksternal ini antara lain yang dimaksud meliputi :

- a. Kondisi politik, ekonomi, social, teknologi dalam lingkup local
- b. Peranan yang dimainkan dari pihak - pihak (sebagai supporting) maupun pihak - pihak sebagai pengganggu (competitor).



- c. Dukungan pihak -pihak yang memeberikan atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.
- d. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air.
- e. Belum optiimalnya cakupan layanan air limbah pekotaan dan pedesaan.
- f. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah terpusat (system sewerage).
- g. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan pekotaan.
- h. Belum tersedianya Rencana Rinci Penataan Ruang (Kawasan Strategis dan rencana teliti Tata Ruang).
- i. Belum optimalnya RT/RW sebagai acuan pembangunan di daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan masih dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepengurusan P3A/GP3A baik secara administrasi maupun teknis. Pembinaan ini diperlukan agar pelayanan terhadap anggota dapat meningkatkan sehingga system irigasi berkelanjutan. Selain itu diperlukan adanya bantuan modal usaha untuk menstimulan usaha ekonomi sehingga mampu mendanai operasional organisasi secara mandiri dan berdampak positif terhadap system irigasi berkelanjutan. Pelaksanaan program pemberdayaan P3A/GP3A menghasilkan informasi kondisi masyarakat/ petani di daerah irigasi, secara social, ekonomi, teknis, dan kelembagaan secara actual sesuai kondisi di lapangan. Selain itu sebagai acuan untuk penyusunan rencana program kegiatan pemberdayaan organisasi P3A/GP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif. Bebrapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : perlu adanya prhatian dari pemerintah untuk modal usaha agar P3A/GP3A termotivasi untuk maju dan mandiri, untuk meningkatkan kinerja kepengurusan P3A/GP3A dalam melaksanakan kegiatan, kepengurusan memerlukan dana bantuan dari pemerintah untuk membangun P3A/GP3A perlu adanya pelatihan -pelatihan yang berhubungan dengan skill. Dinas/instansi terkait harus berperan dalam pembinaan lebih lanjut mengenai social, ekonomi, teknis, dan kelembagaan P3A/GP3A, agr pemerintah merealisasikan program dan tepat sasaran, Rekuitmen TPM/KTPM di informasikan minimal 1 bulan sebelumnya, perlu adanya sarana untuk koordinasi TPM/KTPM dan realisasikan untuk legalitas badan hukum GP3A yang sudah dibentuk/ dibina.

Berdasarkan data -data, hasil keterangan informan dan hasil observasi penulis., maka dapat dikemukakan bahwa indikator responsivitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Subang. Walaupun masih dihadapkan pada kendala dan tantangan yang kompleks dan dinamis untuk merealisasikan kehendak masyarakat.

Responsibilitas yang diarahkan pada program - program Bidang Pengelola Sumber Daya Air menjadi penting dan harus terus dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Subang. Responsibilitas Bidang pengairan mempunyai sasaran tersedianya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan laiinya dan pengolahan penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian dan perikanan serta pengendalian banjir. Untuk mewujudkan sasaran tersebut direncanakan melalui program - program dan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan. Program - program tersebut adlah Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan laiinya, Penyediaan dan pengelolaanair baku, pengembangan, pengelolaan dan



konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir.

Tantangan Dinas PUPR Kabupaten Subang dalam pemenuhan infrastruktur yang memadai memerlukan biaya yang sangat besar, akan tetapi ada keterbatasan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Untuk itu diperlukan adanya penanganan yang sifatnya prioritas, terobosan -terobosan baru dengan inovatif yang dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pembangunan infrastruktur tanpa mengesampingkan kualitas. Factor sumber daya manusia Internal dan Eksternal masih perlu ditingkatkan kemampuan di bidang teknis. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pada umumnya mempergunakan penyediaan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Sebagai konsekuensinya, kualitas hasil pekerjaan tergantung kepada kinerja dan profesionalisme rekanan tersebut, karena kinerja Dinas PUPR Kabupaten Subang tidak terlepas dari kesungguhan para penyedia jasa (rekanan) menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tahapan -tahapan yang sesuai dengan ketentuan.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan jajaran Pemerintahan, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita - cita masyarakat Kabupaten Subang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap dapat segera terwujud.

Berdasarkan data - data, keterangan dan hasil observasi penulis maka dapat dikemukakan indikator responsibilitas cukup diperhatikan. Hal ini berarti kinerja bidang sumber daya air pada Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator responsibilitas tetapi belum secara keseluruhan, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis keukakan diatas, maka dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

1. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input atau output. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Subang dilihat dari indikator produktivitas cukup berhasil. Hal ini berarti bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja sudah cukup berhasil. Disisi lain masih perlu upaya - upaya akselerasi yang sesuai dengan permasalahan public yang dihadapi baik yang mencakup unsur social, ekonomi, teknis maupun unsur kelembagaan seperti permasalahan yang mencakup tempat penampungan air irigasi atau tidak berfungsi optimal sebagai sumber air setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi. Kualitas Layanan; Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi public. Substansi kualitas pelayanan selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka



mencapai tujuan tertentu. Pelayanan public ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan. Segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak - pihak lainnya terkait urusan kedinasan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala. Data - data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data - data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang melalui kegiatan - kegiatan konsultasi seperti perencanaan maupun studi kelayakan; masih kurangnya pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundang - undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang; seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama setahun anggaran berlangsung , sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan; jadi kualitas pelayanan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah cukup tetapi belum efektif. Hal ini berarti bahwa upaya - upaya pelayanan public dilakukan tetapi belum berhasil atau belum efektif.

2. Responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan public karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program - program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah baik dalam merespon public. Hal ini berarti indikator responsivitas sudah diperhatikan dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR Kabupaten Subang. Walaupun masih dihadapkan pada kendala dan tantangan yang kompleks dan dinamis untuk merealisasikan kehendak masyarakat.
3. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas cukup diperhatikan. Hal ini berarti bahwa kinerja bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator responsibilitas tetapi belum efektif secara keseluruhan, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir.
4. Akuntabilitas; bahwa dalam konteks organisasi pemerintah, seringnya istilah akuntabilitas public yang berarti pemerian informasi aktivitas dan kinerja finansial. Dalam kinerja Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Subang indikator akuntabilitas cukup diperhatikan, artinya bahwa kinerja Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator akuntabilitas tetapi upaya meningkatkannya lagi dimasa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja instansi



pemerintah bersifat wajib. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres RI) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian disusul oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi.

## Referensi

- Dunn, Wiliam N., 200, *pengantar analisis kebijakan public*, Yogyakarta : Gadjahmada University Pres
- Dye, Thomas R., 1976, *Policy Analysis : What Governments Do, Why The Do it, And What Difference It makes*, Alabama : The University Of Alabama.
- Dwiyanto, Agus, dkk.2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, seri Kajian Birokrasi. Yogyakarta : Gadjahmada University Press
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. New Jersey
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Erlangga : Jakarta
- Indarwijaya. 2006. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Sinar Baru
- Jenkins. W.I, 1978. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. Rajawali
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, terjemah*, Jakarta:CV. Rajawali
- Keban, Yeremias T, 2005, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta :Penerbit Gaya Media
- Lubis, M.Sally. 2017. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Mandar Maju
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Unit Penertib dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Prabu, Mangunegara Anwar. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT. Reflika Aditama
- Rosidi, D., & Andani, D. (2022). *KINERJA UPT DINAS TERMINAL SUBANG DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL*.
- Subarsono, A.G.2004. *analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta : Bandung
- Tangkillisin, Hassel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Granmedia



Widiasarana Indonesia.

Ulum, Ilhyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

W.Creswell, Jhon. 2010. *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Grafindo Persada

Toha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta. Kencana.

Wahab, Solichin, Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Qahab, Solichin, Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Negara Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Waldo, Dwight. 1971. *Pengantar Studi Public Administration (Terjemah)* Jakarta. Cemerlang.